



EDUTECH

Jurnal Teknologi Pendidikan

Journal homepage <https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech>



Munafik Ekologis dan Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Indonesia: Dakwah Ekologis Reflektif atas Krisis Moral, Pembangunan, dan Lingkungan

Muhtar Solihin,; Munir, & Neirna Yayah Daryati
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
Email: muhtar.solihin@uinsgd.ac.id

ABSTRACT	ARTICLE INFO
<p>Indonesia is increasingly exposed to hydrometeorological disasters such as floods, landslides, prolonged droughts, and extreme weather events. These disasters occur paradoxically amid the growing prominence of environmental discourse in public policy, religious sermons, and development narratives. This article argues that such contradiction reflects a condition of ecological hypocrisy, conceptualized here as ecological munafik: a moral dissonance between publicly proclaimed environmental responsibility and materially destructive practices. Employing a qualitative literature-based approach, this study integrates environmental sociology, political ecology, and Islamic ecological theology to analyze hydrometeorological disasters not merely as natural events, but as manifestations of ethical failure. Through a reflective ecological da'wah framework, the article demonstrates that disasters emerge from the erosion of ecological trust (amanah), the normalization of environmental destruction (fasād), and the weakening of human moral agency as khalifah. This study contributes to interdisciplinary environmental studies by reframing disaster mitigation as a moral-spiritual project alongside technical and policy-based interventions.</p>	<p>Article History: <i>Submitted/Received 22 April 2025</i> <i>First Revised 26 Mei 2026</i> <i>Accepted 15 June 2026</i> <i>First Available online 22 June 2026</i> <i>Publication Date 22 June 2026</i></p> <p>Keyword: <i>Kemunafikan Ekologis, Bencana Hidrometeorologis, Etika Lingkungan Islam, Dakwah Ekologis, Indonesia</i></p>
ABSTRAK	
<p>Indonesia semakin rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan berkepanjangan, dan cuaca</p>	

ekstrem. Bencana-bencana tersebut berlangsung secara paradoksal di tengah menguatnya wacana kepedulian lingkungan dalam kebijakan publik, khotbah keagamaan, dan narasi pembangunan. Artikel ini berargumen bahwa kontradiksi tersebut mencerminkan kondisi munafik ekologis, yakni ketegangan moral antara pengakuan simbolik atas tanggung jawab ekologis dan praktik sosial yang justru merusak lingkungan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, artikel ini mengintegrasikan sosiologi lingkungan, ekologi politik, dan teologi Islam ekologis untuk membaca bencana hidrometeorologi bukan sekadar sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai manifestasi krisis etis. Melalui kerangka dakwah ekologis reflektif, artikel ini menunjukkan bahwa bencana lahir dari pengingkaran amanah ekologis, normalisasi fasād fī al-ard, serta melemahnya peran manusia sebagai khalifah yang bermoral. Studi ini berkontribusi pada penguatan pendekatan interdisipliner dengan menempatkan mitigasi bencana sebagai proyek moral-spiritual, selain sebagai agenda teknis dan kebijakan.

© 2026 Teknologi Pendidikan UPI

1. PENDAHULUAN

Bencana hidrometeorologi telah menjadi lanskap sosial yang nyaris permanen dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tahun, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem muncul silih berganti, sering kali dengan pola yang semakin intens dan meluas. Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami sebagai anomali alamiah, melainkan sebagai bagian dari rutinitas risiko yang menyertai proses pembangunan modern. Ironisnya, eskalasi bencana tersebut terjadi justru ketika kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan lingkungan semakin sering digaungkan dalam kebijakan negara, dokumen pembangunan, maupun wacana keagamaan.

Paradoks inilah yang menjadi titik tolak artikel ini. Di satu sisi, negara, korporasi, dan institusi sosial termasuk lembaga keagamaan secara aktif memproduksi narasi kepedulian lingkungan: pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, ekoteologi, dan tanggung jawab antargenerasi. Namun di sisi lain, laju deforestasi, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta kerentanan ekosistem terus meningkat. Ketegangan antara klaim normatif dan realitas praksis tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan semata persoalan teknis atau manajerial, melainkan problem moral yang lebih dalam.

Artikel ini menyebut kondisi tersebut sebagai munafik ekologis. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai label moralistik individual, tetapi sebagai kategori analitis untuk membaca fenomena sosial yang lebih luas. Munafik ekologis merujuk pada situasi ketika komitmen ekologis dikemukakan secara simbolik dan diskursif, tetapi disangkal secara struktural melalui praktik pembangunan, kebijakan ekonomi, dan gaya hidup kolektif. Dalam konteks ini, bahasa kepedulian lingkungan justru berfungsi menutupi proses perusakan yang terus berlangsung.

Dalam kajian sosiologi lingkungan, fenomena semacam ini sering dijelaskan melalui konsep *risk society*, yakni kondisi ketika bahaya ekologis diproduksi secara sistemik oleh rasionalitas pembangunan modern. Risiko tidak lagi datang dari luar sistem sosial, melainkan dihasilkan oleh keputusan manusia sendiri. Namun, penjelasan sosiologis tersebut sering kali berhenti pada analisis struktural dan institusional, tanpa menggali dimensi etis dan spiritual yang menopang atau justru melegitimasi praktik-praktik tersebut.

Di sinilah pendekatan dakwah ekologis reflektif menjadi relevan. Dakwah dalam pengertian ini tidak dipahami sebagai seruan normatif yang bersifat moralistik, melainkan sebagai proses kesadaran kritis yang mengajak masyarakat merefleksikan relasi mereka dengan alam, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Dakwah ekologis reflektif tidak berhenti pada anjuran “menjaga lingkungan”, tetapi mempertanyakan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan kerusakan ekologis terus direproduksi sambil tetap dibungkus oleh bahasa religius.

Dalam perspektif Islam, relasi manusia dan alam dibingkai oleh konsep-konsep etis yang kuat, seperti amanah, *fasād fī al-ard*, dan khalifah. Alam tidak diposisikan sebagai objek eksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai titipan yang mengandung tanggung jawab moral. Kerusakan ekologis bukan hanya pelanggaran ekologis, tetapi juga pelanggaran etis dan spiritual. Namun, dalam praktik sosial, konsep-konsep ini sering direduksi menjadi slogan normatif tanpa daya kritis terhadap kebijakan pembangunan dan kepentingan ekonomi.

Fenomena inilah yang memperkuat karakter munafik ekologis dalam konteks religius. Agama hadir dalam ruang publik sebagai legitimasi moral, tetapi kehilangan fungsi profetiknya untuk mengoreksi relasi kuasa yang merusak lingkungan. Dakwah

ekologis reflektif, sebagaimana ditawarkan artikel ini, berupaya mengembalikan fungsi tersebut dengan menjadikan krisis ekologis sebagai medan refleksi iman dan tanggung jawab sosial.

Secara akademik, artikel ini mengisi celah penelitian (research gap) dalam studi bencana dan lingkungan di Indonesia. Sebagian besar kajian bencana masih berfokus pada aspek teknis mitigasi, tata kelola, dan adaptasi, sementara dimensi moral-teologis sering diposisikan sebagai pelengkap normatif. Artikel ini menawarkan pembacaan alternatif dengan menempatkan dimensi etis dan dakwah sebagai lensa analitis utama, bukan sekadar ornamen diskursif.

Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah:

- 1) Mengembangkan konsep munafik ekologis sebagai kerangka analitis dalam membaca krisis lingkungan;
- 2) Menjelaskan keterkaitannya dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi di Indonesia; dan
- 3) Merumuskan dakwah ekologis reflektif sebagai pendekatan etis yang menghubungkan iman, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kontribusi artikel ini terletak pada upaya menjembatani sosiologi lingkungan, ekologi politik, dan teologi Islam dalam satu kerangka analisis yang integratif. Dengan pendekatan ini, bencana hidrometeorologi tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan alam atau kegagalan kebijakan, melainkan sebagai cermin krisis moral kolektif yang menuntut refleksi dan transformasi bersama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data utama terdiri atas literatur teoretis dalam bidang sosiologi lingkungan, ekologi politik, sosiologi moral, serta kajian bencana dan pembangunan di Indonesia. Literatur tersebut meliputi buku akademik, artikel jurnal bereputasi, dan laporan analitis yang relevan dengan tema bencana hidrometeorologi. Analisis dilakukan secara tematik-konseptual, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola argumentasi tentang relasi antara pembangunan, kerusakan lingkungan, dan produksi risiko;
2. Mengkonstruksi konsep munafik ekologis sebagai kategori analitis; dan
3. Mengaitkan konsep tersebut dengan realitas bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk membangun pemahaman kritis mengenai kontradiksi moral dan struktural yang melatarbelakangi krisis ekologis. Metode ini lazim digunakan dalam kajian teoritis dan reflektif yang berorientasi pada pengembangan konsep dan sintesis lintas disiplin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Munafik Ekologis dalam Perspektif Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik

1. Bencana Hidrometeorologi sebagai Fakta Sosial dan Produk Relasional

Bencana hidrometeorologi dalam konteks Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena alamiah yang berdiri sendiri. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang berulang justru memperlihatkan pola relasional antara dinamika alam dan

keputusan sosial manusia. Dalam perspektif sosiologi lingkungan, bencana merupakan fakta sosial ekologis, yakni peristiwa yang lahir dari interaksi antara struktur sosial, praktik ekonomi, kebijakan politik, dan kondisi biofisik lingkungan.

Pemahaman ini menolak dikotomi tajam antara “bencana alam” dan “bencana sosial”. Alih-alih melihat alam sebagai aktor tunggal, pendekatan relasional menempatkan manusia melalui sistem produksi, konsumsi, dan tata kelola sebagai bagian integral dari proses terjadinya bencana. Dengan kata lain, intensitas dan dampak bencana hidrometeorologi tidak hanya ditentukan oleh curah hujan atau kondisi geologis, tetapi juga oleh cara manusia mengelola ruang, hutan, sungai, dan wilayah pesisir.

Dalam konteks Indonesia, relasi ini tampak jelas pada wilayah-wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi dan alih fungsi lahan masif. Banjir tidak hanya terjadi karena hujan ekstrem, tetapi karena hilangnya daya serap tanah dan rusaknya ekosistem penyangga. Namun, narasi resmi sering kali memisahkan faktor alam dari keputusan pembangunan, sehingga tanggung jawab sosial dan politik menjadi kabur. Di sinilah bencana berfungsi sebagai “gejala”, bukan penyebab utama krisis ekologis.

2. Produksi Risiko dan Normalisasi Kerentanan

Pendekatan risk society memberikan kerangka analitis penting untuk memahami bagaimana risiko ekologis diproduksi dan dinormalisasi dalam masyarakat modern. Risiko tidak lagi dipahami sebagai ancaman eksternal, melainkan sebagai konsekuensi inheren dari rasionalitas pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi teknologis. Dalam masyarakat risiko, bencana hidrometeorologi bukan anomali, tetapi bagian dari harga yang “harus dibayar” demi pembangunan.

Normalisasi risiko ini memiliki implikasi moral yang serius. Ketika banjir dan longsor diperlakukan sebagai peristiwa rutin tahunan, sensitivitas etis terhadap penderitaan korban cenderung menurun. Bencana menjadi statistik, bukan tragedi moral. Lebih jauh, normalisasi ini memungkinkan negara dan aktor ekonomi untuk menghindari pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan dan relasi manusia dengan alam.

Munafik ekologis bekerja secara halus dalam proses ini. Di satu sisi, risiko diakui melalui wacana mitigasi dan adaptasi. Di sisi lain, sumber struktural risikoseperti eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan akses lahan dibiarkan tetap utuh. Dengan demikian, pengelolaan risiko menjadi substitusi bagi pencegahan kerusakan ekologis yang lebih mendasar.

3. Ekologi Politik dan Ketimpangan Dampak

Ekologi politik memperlihatkan bahwa bencana tidak pernah berdampak secara netral. Dampak bencana selalu terdistribusi secara tidak merata, mengikuti garis ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Komunitas miskin, masyarakat adat, dan kelompok marjinal sering kali menanggung beban terbesar dari bencana hidrometeorologi, meskipun mereka bukan aktor utama perusakan lingkungan.

Dalam konteks ini, munafik ekologis memiliki dimensi struktural yang kuat. Kepedulian lingkungan sering dikemas dalam bahasa universal “demi kepentingan bersama” tetapi praktiknya justru melanggengkan ketimpangan. Proyek pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional atau keberlanjutan jangka panjang sering kali mengorbankan ruang hidup kelompok rentan, sekaligus memperbesar kerentanan ekologis mereka.

Bahasa pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai legitimasi moral. Ia menciptakan kesan bahwa eksploitasi alam dilakukan secara terkendali dan bertanggung jawab, meskipun data empiris menunjukkan sebaliknya. Dalam kerangka ini, munafik

ekologis bukan sekadar inkonsistensi, tetapi mekanisme ideologis yang menutupi relasi kuasa dalam pengelolaan lingkungan.

4. Kekuasaan Simbolik dan Ilusi Kepedulian Lingkungan

Salah satu ciri utama munafik ekologis adalah dominasi simbol atas substansi. Kepedulian lingkungan diekspresikan melalui slogan, dokumen kebijakan, dan kampanye publik, tetapi tidak diikuti oleh perubahan struktural yang signifikan. Dalam sosiologi kritis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan simbolik, di mana bahasa digunakan untuk membentuk persepsi realitas tanpa transformasi material.

Ilusi kepedulian lingkungan ini memiliki efek menenangkan. Ia meredam kritik publik dan menciptakan rasa seolah-olah masalah ekologis sedang ditangani, padahal kerusakan terus berlangsung. Dalam jangka panjang, ilusi ini justru memperdalam krisis, karena menghambat refleksi kritis dan tindakan korektif yang lebih radikal.

Bencana hidrometeorologi berulang berfungsi sebagai momen disrupsi terhadap ilusi tersebut. Ketika banjir dan longsor terjadi secara masif, narasi kepedulian lingkungan kehilangan daya legitimasi. Namun, tanpa refleksi moral yang mendalam, momen disrupsi ini sering kali berlalu tanpa perubahan signifikan, dan siklus munafik ekologis kembali berulang.

5. Munafik Ekologis sebagai Krisis Moral Kolektif

Dari perspektif sosiologi moral, munafik ekologis mencerminkan krisis integritas kolektif. Nilai-nilai ekologis diakui secara normatif, tetapi tidak diinternalisasi sebagai komitmen etis yang mengikat tindakan. Dalam kondisi ini, moralitas berfungsi lebih sebagai identitas simbolik daripada pedoman praksis.

Krisis ini tidak dapat direduksi pada kegagalan individu. Ia merupakan hasil dari struktur sosial yang memisahkan nilai dari tindakan, serta dari sistem ekonomi-politik yang memberi insentif pada eksploitasi alam. Munafik ekologis, dengan demikian, adalah ekspresi dari disjungsi antara kesadaran dan tanggung jawab, antara pengakuan moral dan keberanian untuk berkorban demi keberlanjutan.

Bencana hidrometeorologi menjadi cermin yang memantulkan krisis tersebut. Ia memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya soal rusaknya ekosistem, tetapi juga rusaknya relasi moral manusia dengan alam dan sesama.

6. Transisi Analitis Menuju Perspektif Teologis

Analisis sosiologi lingkungan dan ekologi politik memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme struktural munafik ekologis. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan normatif: mengapa kontradiksi ini harus dipersoalkan secara etis, dan bagaimana masyarakat dapat membangun komitmen moral yang lebih kokoh terhadap lingkungan?

Pertanyaan inilah yang membuka ruang bagi integrasi perspektif teologis Islam. Jika munafik ekologis adalah krisis moral kolektif, maka konsep-konsep seperti amanah, fasad fi al-ard, dan khalifah menawarkan bahasa normatif yang kuat untuk merefleksikan relasi manusia dan alam secara lebih mendalam. Dengan demikian, Bagian B akan menggeser fokus dari analisis struktural menuju dakwah ekologis reflektif sebagai praksis moral dan spiritual.

B. Dakwah Ekologis Reflektif dalam Perspektif Teologi Islam: Amanah, Fasad, dan Khalifah

1. Teologi Islam dan Krisis Ekologis: Dari Normativitas ke Refleksivitas

Dalam tradisi Islam, relasi manusia dan alam tidak pernah dipahami secara netral atau instrumental semata. Alam diposisikan sebagai bagian dari tatanan kosmik yang sarat makna etis dan spiritual. Namun, dalam praktik sosial modern, dimensi teologis ini sering tereduksi menjadi slogan moral yang kehilangan daya kritis terhadap struktur ekonomi-politik yang merusak lingkungan. Reduksi inilah yang memungkinkan lahirnya apa yang dalam artikel ini disebut sebagai munafik ekologis dalam konteks religius.

Sebagian besar wacana keagamaan tentang lingkungan masih bergerak pada level normatif, menyerukan kepedulian, kesederhanaan, dan tanggung jawab tanpa mengaitkannya secara serius dengan praktik pembangunan, kebijakan publik, dan relasi kuasa. Akibatnya, agama hadir sebagai legitimasi simbolik, bukan sebagai sumber refleksi kritis. Dakwah ekologis reflektif yang ditawarkan artikel ini justru berangkat dari kesadaran bahwa krisis ekologis adalah krisis moral dan spiritual yang menuntut evaluasi mendalam terhadap cara manusia memaknai amanah, kekuasaan, dan kemajuan.

2. Amanah Ekologis dan Peningkaran Tanggung Jawab Moral

Konsep amanah merupakan fondasi etika Islam dalam memahami relasi manusia dengan alam. Amanah menegaskan bahwa alam bukan milik manusia secara absolut, melainkan titipan yang mengandung tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, eksploitasi alam tanpa batas bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi pengkhianatan terhadap mandat etis yang diberikan kepada manusia.

Namun, dalam praktik pembangunan modern, amanah ekologis sering dipersempit menjadi tanggung jawab individual misalnya melalui kampanye perilaku ramah lingkungan, sementara dimensi strukturalnya diabaikan. Negara dan korporasi dapat mengklaim komitmen lingkungan melalui regulasi dan sertifikasi, tetapi tetap menjalankan proyek yang merusak ekosistem secara sistemik. Inilah bentuk munafik ekologis yang paling problematik: amanah diakui secara simbolik, tetapi dinegasikan secara struktural.

Bencana hidrometeorologi dalam konteks ini dapat dibaca sebagai konsekuensi dari peningkaran amanah ekologis. Ketika hutan dibabat, daerah resapan air dihilangkan, dan sungai diperlakukan sebagai saluran limbah, maka kerusakan yang terjadi bukan hanya ekologis, tetapi juga etis. Dakwah ekologis reflektif mengajak umat untuk melihat bencana bukan sebagai hukuman metafisik, melainkan sebagai cermin kegagalan manusia menjaga amanah.

3. Fasad fi al-Ard sebagai Kerangka Kritik Struktural

Konsep Fasad fi al-Ard (kerusakan di muka bumi) sering dipahami secara moralistik, dikaitkan dengan dosa individual atau penyimpangan akhlak personal. Padahal, dalam konteks sosial kontemporer, fasād justru lebih relevan dibaca sebagai kerusakan struktural yang dihasilkan oleh sistem ekonomi-politik yang eksploitatif.

Kerusakan lingkungan akibat ekstraktivisme, industrialisasi tak terkendali, dan urbanisasi yang mengabaikan daya dukung ekologis merupakan manifestasi nyata fasad fi al-ard. Dalam perspektif ini, fasād bukan sekadar akibat dari niat buruk individu, tetapi dari normalisasi praktik yang secara sistemik merusak keseimbangan alam. Dengan demikian, menyebut krisis ekologis sebagai fasād berarti menggeser fokus dari moralitas individual menuju tanggung jawab kolektif dan struktural.

Munafik ekologis muncul ketika fasad diakui secara retorik misalnya melalui pernyataan keprihatinan atau seruan taubat ekologis tanpa keberanian untuk mengubah

struktur yang melahirkannya. Dakwah ekologis reflektif menolak pendekatan semacam ini dan menuntut konsistensi antara pengakuan moral dan transformasi praksis.

4. Khalifah sebagai Moral Agency, Bukan Lisensi Eksploitasi

Konsep khalifah sering disalahpahami sebagai legitimasi kekuasaan manusia atas alam. Dalam tafsir yang reduksionis, khalifah dimaknai sebagai mandat untuk “menguasai” dan “memanfaatkan” alam demi kepentingan manusia. Tafsir semacam ini justru berkontribusi pada munafik ekologis, karena membungkus eksploitasi alam dengan legitimasi teologis.

Sebaliknya, dalam kerangka etika Islam, khalifah lebih tepat dipahami sebagai moral agency, yakni kapasitas manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab dan reflektif. Khalifah bukan posisi dominasi, melainkan beban tanggung jawab. Manusia diberi akal dan kebebasan bukan untuk merusak, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan ekologis.

Dalam konteks bencana hidrometeorologi, kegagalan manusia menjalankan peran khalifah terlihat dari keputusan-keputusan yang mengorbankan keberlanjutan demi keuntungan jangka pendek. Dakwah ekologis reflektif berupaya merebut kembali makna khalifah sebagai panggilan etis untuk menolak praktik pembangunan yang merusak, meskipun dibenarkan oleh logika ekonomi dan politik.

5. Dakwah Ekologis Reflektif sebagai Praktik Transformasi Sosial

Dakwah ekologis reflektif tidak berhenti pada penyampaian nilai-nilai normatif, tetapi berfungsi sebagai praktik kesadaran kritis. Dakwah ini mengajak umat untuk merefleksikan relasi antara iman, kekuasaan, dan lingkungan, serta menantang normalisasi munafik ekologis dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks Indonesia, dakwah ekologis reflektif memiliki potensi strategis karena agama masih menjadi sumber legitimasi moral yang kuat. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika dakwah bersedia bersikap kritis terhadap struktur sosial yang merusak lingkungan, termasuk ketika struktur tersebut dibenarkan atas nama pembangunan nasional atau kepentingan umat.

Dengan demikian, dakwah ekologis reflektif berperan sebagai jembatan antara analisis struktural (sebagaimana dibahas dalam Bagian A) dan transformasi moral kolektif. Ia menempatkan bencana hidrometeorologi sebagai medan refleksi iman, bukan sekadar objek manajemen risiko.

4. SIMPULAN

Krisis Ekologis sebagai Cermin Relasi Sosial

Temuan utama artikel ini menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi harus dibaca sebagai ekspresi dari relasi manusia alam yang dibentuk oleh pilihan sosial, institusional, dan kultural. Bencana tidak hadir di ruang hampa, melainkan muncul dari konfigurasi kebijakan pembangunan, orientasi ekonomi, dan cara pandang dominan terhadap alam. Dengan demikian, bencana berfungsi sebagai indikator krisis relasional yang memperlihatkan kegagalan kolektif dalam mengelola hubungan antara manusia, kekuasaan, dan lingkungan.

Munafik Ekologis sebagai Gejala Struktural

Konsep munafik ekologis yang dikembangkan dalam artikel ini memperlihatkan bagaimana ketimpangan antara wacana dan praktik ekologis dilembagakan secara sistemik. Kepedulian lingkungan dapat tampil kuat di tingkat simbolik melalui regulasi, narasi keberlanjutan, dan seruan moral namun tidak berbanding lurus dengan perubahan substantif dalam pola produksi, konsumsi, dan tata kelola ruang. Ketegangan ini bukan sekadar persoalan inkonsistensi etis individu, melainkan hasil dari mekanisme sosial yang memungkinkan normalisasi kerusakan sambil mempertahankan citra kepedulian.

Produksi Risiko dan Ketimpangan Dampak

Pendekatan sosiologi lingkungan dan ekologi politik menunjukkan bahwa risiko ekologis tidak hanya dihasilkan secara sosial, tetapi juga didistribusikan secara tidak adil. Kelompok yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap degradasi lingkungan justru sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Perspektif ini menegaskan bahwa bencana selalu membawa dimensi tanggung jawab sosial dan politik, sekaligus menolak penafsiran yang memandang bencana sebagai peristiwa alamiah yang tak terelakkan.

Relevansi Etika Islam dalam Kritik Struktural

Integrasi konsep-konsep etika Islam membuka ruang kritik yang lebih dalam terhadap krisis ekologis kontemporer. Amanah menggeser relasi manusia-alam dari logika kepemilikan menuju tanggung jawab. Fasad fi al-ard menyediakan bahasa teologis untuk membaca kerusakan sebagai hasil sistem yang eksploitatif, bukan sekadar penyimpangan moral personal. Sementara itu, khalifah dipahami sebagai kapasitas etis manusia untuk bertindak reflektif dan bertanggung jawab, termasuk keberanian untuk menentang praktik pembangunan yang merusak meskipun dilegitimasi oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Dakwah Ekologis sebagai Praktik Kesadaran Kritis

Dakwah ekologis reflektif yang ditawarkan artikel ini menempatkan dakwah sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis, bukan sekadar medium penyampaian nilai normatif. Dakwah diarahkan untuk menghubungkan iman dengan refleksi atas struktur sosial yang memproduksi kerusakan lingkungan. Dengan cara ini, dakwah tidak hanya mengajak pada kesalehan personal, tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif dan transformasi praksis yang lebih adil secara ekologis.

5. PERNYATAAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait penerbitan artikel ini. Penulis menegaskan bahwa naskah artikel bebas dari plagiarisme.

6. REFERENSI

- Bauman, Z. (1993). *Postmodern ethics*. Blackwell.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity* (M. Ritter, Trans.). Sage Publications.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Harvard University Press.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Foster, J. B. (2010). *The ecological rift: Capitalism's war on the earth*. Monthly Review Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

Giddens, A. (2009). *The politics of climate change*. Polity Press.

Hajer, M. A. (1995). *The politics of environmental discourse: Ecological modernization and the policy process*. Oxford University Press.

Khalid, F. (2002). *Islam and the environment*. Social Science Publishers.

Nasr, S. H. (1968). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. George Allen & Unwin.

Ozdemir, İ. (2003). *Toward an understanding of environmental ethics from a Qur'anic perspective*.

In R. C. Foltz, F. M. Denny, & A. Baharuddin (Eds.), *Islam and ecology: A bestowed trust*. Harvard University Press.

Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.

Zizek, S. (1989). *The sublime object of ideology*. Verso.